



**Pengaruh Pembiayaan Syariah dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terhadap
di Kemiskinan di Kalimantan**

***The Influence of Sharia Financing and the National Capital of the Archipelago on
Poverty in Borneo***

¹*Dwi Haryanto

¹[Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia](mailto:haryantodwi1981@gmail.com)

ARTIKEL INFO

Diterima
Oktober 2024

Dipublikasi:
November 2024

*e-mail :
haryantodwi1981@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh pembiayaan syariah dan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara terhadap kemiskinan di provinsi yang berada di Kalimantan. Metode pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi data panel Fixed Effect Model (FEM). Variabel pada penelitian ini adalah kemiskinan, pembiayaan syariah, dana pihak ketiga, pendapatan domestik regional bruto (PDRB) di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara serta Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai variabel dummy. Sumber data berasal dari data kemiskinan dan PDRB yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) serta data pembiayaan syariah dan jumlah dana pihak ketiga yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2014 sampai 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah dan IKN berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan yang ada di provinsi Kalimantan.

Kata Kunci : Pembiayaan Syariah, IKN, Kemiskinan, Kalimantan

ABSTRACT

This study examines the effect of sharia financing and the development of the national capital (IKN) of the archipelago on poverty in provinces in Kalimantan. The method in this study uses a quantitative method with Fixed Effect Model (FEM) panel data regression analysis. The variables in this study are poverty, sharia financing, third-party funds, gross regional domestic product (GRDP) in West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan and North Kalimantan and the National Capital (IKN) of the archipelago as a dummy variable. The data source comes from poverty and GRDP data issued by the Central Statistics Agency (BPS) as well as sharia financing data and the amount of third-party funds issued by the Financial Services Authority (OJK) from 2014 to 2023. The results of the study show that sharia bank financing and IKN have an effect on reducing poverty in the province of Kalimantan.

Keywords: Sharia Financing, IKN, Poverty, Borneo.

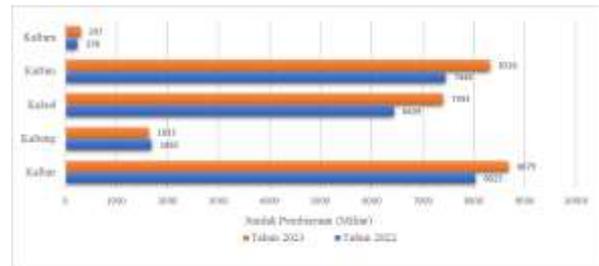
© Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

PENDAHULUAN

Keuangan syariah menurut IMF (2017) adalah transaksi keuangan Islam yang mengacu pada penyediaan layanan keuangan sesuai dengan hukum, prinsip dan aturan syariah Islam. Syariah tidak memperbolehkan penerimaan dan pembayaran riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), maysir (perjudian), penjualan jangka pendek atau kegiatan pendanaan yang dianggap merugikan masyarakat. Sebaliknya, para pihak harus berbagi resiko dan manfaat dari suatu transaksi bisnis dan transaksi tersebut harus mempunyai tujuan ekonomi yang nyata tanpa spekulasi yang tidak semestinya, dan tidak melibatkan eksploitasi apa pun oleh salah satu pihak.

Perbankan syariah di Indonesia sebagai bagian dari keuangan syariah mengalami pertumbuhan semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini tak lain karena meningkatnya kesadaran umat Islam akan pentingnya menggunakan instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset perbankan syariah di Indonesia per Juni 2024 mencapai Rp. 874 Triliun. Aset ini meningkat dari posisi Desember 2023 sebesar Rp. 868 triliun. Meningkatnya aset perbankan syariah di Indonesia juga diikuti dengan peningkatan pembiayaan yang mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari Bank Umum Syariah (BUS) termasuk Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah pembiayaan yang disalurkan pada akhir bulan Juni 2024 oleh bank syariah sebesar Rp 822 Triliun, meningkat dari akhir Desember 2023 sebesar Rp. 800 Triliun. Selain mengalami pertumbuhan secara nasional, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah juga terjadi di berbagai wilayah di Indonesia diantaranya adalah perbankan syariah yang berada di provinsi-provinsi yang ada di pulau Kalimantan.

Tabel I. Pembiayaan Bank Syariah di Kalimantan



Dari tabel I dapat kita dilihat bahwa pembiayaan syariah meningkat di provinsi-provinsi yang ada di Kalimantan, kecuali provinsi Kalimantan Tengah yang mengalami penurunan pembiayaan perbankan syariah pada tahun 2023. Dengan adanya pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah di provinsi yang ada di Pulau Kalimantan diharapkan dapat berdampak terhadap penurunan kemiskinan melalui penyaluran pembiayaan yang tepat di sejumlah provinsi di Kalimantan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, kemiskinan di provinsi Kalimantan barat sebesar 6.71 %, Kalimantan Tengah 5.11 %, Kalimantan Selatan 4.29%, Kalimantan Timur 6.11% dan Kalimantan Utara 6.45%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara mempunyai angka kemiskinan yang tinggi di Kalimantan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan perbankan syariah yang ada di Kalimantan terhadap kemiskinan yang ada di Provinsi-Provinsi Kalimantan.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /Seojk.05/2016 pengertian pembiayaan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah menurut ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Umam (2016), mendefinisikan pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau tuntutan yang disamakan dengan berbagai bentuk yaitu transaksi bagi hasil berupa pembiayaan dengan

akad mudharabah dan akad musyarakah, transaksi sewa menyewa berupa dengan akad ijarah atau sewa beli, transaksi jual beli dengan akad murabahah, salam dan istishna', peminjaman berupa piutang dengan akad qardh, berdasarkan perjanjian antara Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas pendanaan untuk mengembalikannya dana setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil, margin (keuntungan), ujarah (upas jasa dan sewa), atau tanpa imbalan.

Pengertian kemiskinan adalah penduduk yang hidup dalam keadaan kurang nutrisi dan kesehatan yang buruk, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, hidup di wilayah-wilayah yang lingkungannya buruk, dan memiliki penghasilan yang rendah (Todaro dan Smith, 2003). Penduduk miskin adalah penduduk dengan rata-rata pengeluaran atau pendapatan perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan, penduduk hampir miskin adalah penduduk yang hidup dalam kondisi sedikit di atas garis kemiskinan (Lan, 2009).

Beberapa penelitian tentang pengaruh keuangan Islam terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh para peneliti. Umar, dkk. (2021), Agustina dkk (2022), menyatakan bahwa keuangan Islam memberikan pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Tohirin dan Husaini (2019), dalam penelitiannya juga menemukan bahwa pembiayaan syariah dapat mengurangi kemiskinan, penelitian ini juga menekankan bahwa pembiayaan berdasarkan skema bagi hasil (profit and loss sharing) akan mendorong pembiayaan ke sektor riil yang berdampak langsung terhadap rumah tangga miskin. Hal ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Masrizal dan Trianto (2022), Amijaya, dkk. (2023), bahwa pembiayaan yang dijalankan secara benar dan sesuai syariah dengan skema bagi hasil (profit and loss sharing) berdampak langsung terhadap perekonomian di Indonesia

sehingga dapat mengatasi penurunan kemiskinan.

Kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh satu atau dua variabel saja yang menyebabkan naik turun performanya. Tidak mungkin satu atau dua variabel saja yang dapat mempengaruhi kemiskinan. Berbagai variabel yang digunakan dalam satu model kemiskinan dimaksudkan untuk mencegah hasil penghitungan yang bias. Variabel yang ditambahkan untuk mendukung variabel utama biasa disebut sebagai variabel kontrol. Selain itu, variabel kontrol adalah variabel yang sengaja dikelola atau disesuaikan untuk meminimalkan dampak faktor eksternal yang tidak diteliti terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Tujuan utama dari variabel kontrol adalah untuk memastikan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dinilai secara akurat dan tidak dikacaukan oleh faktor-faktor luar lainnya (Listiyani, 2023). Dalam penelitian ini beberapa variabel kontrol yang mempengaruhi kemiskinan adalah produk domestik regional bruto atau PDRB (Alhudhori, 2017); Cholili, 2014), dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah (Irwansyah, 2020) dan penulis memasukkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai variabel dummy.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif Metode kuantitatif digunakan untuk merangkum, membuat rata-rata, menemukan pola, membuat prediksi, dan menguji hubungan sebab akibat serta menggeneralisasi hasil ke populasi yang lebih luas. Hal ini memungkinkan untuk mengukur ukuran dampak, menentukan kekuatan asosiasi, menentukan peringkat prioritas, dan menimbang kekuatan bukti efektivitas (Rana, dkk.2021). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis data panel sebagai alat untuk pengolahan data menggunakan Eviews 13. Metode analisis data panel ialah kombinasi

antara deret waktu (time series) dengan analisis deret hitung (cross section), (Widarjono, 2016). Pada penelitian ini juga memasukkan variabel dummy. Variabel dummy merupakan variabel independen yang bernilai 0 atau 1. Dalam analisis kuantitatif, variabel dummy adalah pengganti numerik untuk fakta kualitatif atau logika dalil (Garavaglia, dkk. 1998). Dummy variabel pada penelitian ini adalah Ibu Kota Nusantara (IKN). Nilai IKN pada penelitian ini ditandai dengan angka (1) pada saat pembangunan IKN dan angka (0) sebelum pembangunan IKN:

Adapun model regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Kmk_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogPmby}_{it} + \beta_2 \text{logDPK} + \beta_3 \text{PDRB}_{it} + \beta_4 \text{IKN}_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

Kmkn : Kemiskinan
 LogPemby : Log Pembiayaan
 LogDPK : Log Dana Pihak Ketiga
 IKN : Ibu Kota Nusantara

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun data sekunder yang digunakan daa penelitian ini adalah data *cross setion* dan *time series* dari 5 Provinsi di Kalimantan yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 atau lebih sering disebut dengan data Panel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regresi mempunyai 3 jenis yaitu yang pertama *Common Effect Model* (CEM) atau *Ordinary Least Squares* (OLS) adalah model regresi data panel paling sederhana, yang cukup baik digunakan apabila data panel yang digunakan heterogen dan estimasi model bertujuan mencari pengaruh rata-rata variabel

independen terhadap variabel dependen. Model yang kedua adalah *Fixed Effects Model* (FEM) adalah model regresi data panel yang memperhitungkan efek khusus dari setiap unit yang diamati dan efek perubahan waktu antar unit. Model ini juga memperhitungkan hubungan antara variabel dependen dan independen dalam setiap unit pada waktu tertentu secara terpisah. Model yang ketiga adalah *Random Effects Model* (REM) adalah model regresi data panel yang memperhitungkan variasi antar unit yang tidak teramati atau kebetulan dalam data panel. Model ini juga memungkinkan untuk menguji keberadaan efek antara dalam data, yang mana pengaruh efek antara lambat laun akan menyebabkan model dengan efek tetap menjadi tidak konsisten.

Ada beberapa tes yang bisa dilakukan untuk memilih yang paling tepat model pengelolaan data panel, yaitu:

- Uji Chow merupakan pengujian untuk mengetahui model fixed effect atau common model efek yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Ini pengujian mengikuti distribusi F-statistik. Jika nilai F hitung adalah lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol diterima yang berarti bahwa Model yang benar untuk regresi data panel adalah model Common Effect. Itu hipotesis yang digunakan dalam Uji Chow adalah sebagai berikut:

H_0 : Common Effect Model

H_1 : Fixed Effect Model

Uji Chow dilakukan melalui *software* Eviews 13 Yaitu jika nilai *Prob. Cross-section Chi-square* < 0,05 maka kita akan memilih *fixed effect* dari pada *common effect* dan sebaliknya jika nilainya > 0,05 maka kita akan memilih *common effect* daripada *fixed effect*. Dari uji Chow di dapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel II. Uji chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	226.647217(4,33)		0.0000
Cross-section Chi-square	140.6552644		0.0000

Sumber : Data yang di olah

Dari hasil uji chow di dapat hasil *Prob. Cross-section Chi-square < 0,05* maka kita akan memilih *fixed effect* dari pada *common effect*.

b) Tes Hausman. Uji Hausman digunakan untuk mengetahui metode mana yang paling tepat untuk digunakan antara Efek Tetap dan Efek Acak. Tes ini menggunakan distribusi chi kuadrat pada derajat kebebasan (k-1) dengan hipotesis dibentuk dalam uji Hausman sebagai berikut:

H0: Model Efek Acak

H1: Model Efek Tetap

Jika p-value lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis nolnya adalah ditolak dan model yang benar adalah *Fixed Effect Model (FEM)*, di sisi lain Sebaliknya, jika nilai p lebih besar dari 0,05 maka model yang sesuai adalah *Random Efek Model*.

Tabel III. Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	906.5888704		0.0000

Sumber: Data yang diolah

Hasil uji hausman menunjukkan nilai Cross section random pada kolom probabilitas lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga *Fixed Effect Model (FEM)* lebih baik dari *Ranfom Effect Model (REM)*. Dari hasil pengujian *Chow Test*, dan *Hausman Test* menunjukkan bahwa estimasi yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini ialah dengan estimasi *Fixed Effect Model (FEM)*.

c) Statistik Deskriptif

Hasil analisa statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV. Statistik Deskriptif Provinsi Kalimantan Barat

Kalbar	Kemiskinan	Pembiayaan	DPK	PDR B
Rata-rata	7.49	5101.10	3035.10	4.30
Minima			1700.00	-
I	6.71	2535.00	4725.00	1.82
Max	8.07	8679.00	00	5.20

Sumber: Data yang diolah

Dari tabel IV dapat dilihat bahwa kemiskinan tertinggi di Kalimantan Barat adalah sebesar 8.07% dan tingkat kemiskinan minimal sebesar 6.71%. PDRB tertinggi Kalimantan Barat adalah sebesar 5.20% dan PDRB terendah adalah sebesar (- 1.82%).

Tabel V. Statistik Deskriptif Provinsi Kalimantan Tengah

Kalteng	Kemiskinan	Pembiayaan	DPK	PDR B
Rata-rata	5.36	1272.50	961.40	5.08
Minimal	4.82	665.00	616.00	-
Max	6.07	1729.00	1542.00	7.01

Sumber: Data yang diolah

Dari tabel V menunjukkan kemiskinan tertinggi di Kalimantan Tengah adalah sebesar 6.07% dan tingkat kemiskinan terendah sebesar 4.82%. PDRB tertinggi Kalimantan Tengah adalah sebesar 7.01% dan PDRB terendah adalah sebesar (- 1.41%).

Tabel VI. Statistik Deskriptif Provinsi Kalimantan Selatan

Kalsel	Kemiskinan	Pembiayaan	DPK	PDR B
Rata-rata	4.65	4822.50	5629.80	3.92
Minimal	4.29	2811.00	2965.00	-
Max	4.99	7393.00	8851.00	5.28

Sumber: Data yang diolah

Tabel VI menunjukkan kemiskinan tertinggi di Kalimantan Selatan adalah sebesar 4.99% dan tingkat kemiskinan terendah sebesar 4.29%. PDRB tertinggi Kalimantan Selatan adalah sebesar 5.28% dan PDRB terendah adalah sebesar (- 1.82%).

Tabel VII. Statistik Deskriptif Provinsi Kalimantan Timur

Kaltim	Kemiskinan	Pembiayaan	DPK	PDR B
Rata-rata	6.18	5615.20	7020.10	2.10
Minimal	5.94	4126.00	4116.00	-
Max				2.90

			11584.	
Max	6.54	8316.00	00	6.22

Sumber: Data yang diolah

Tabel VII menunjukkan kemiskinan tertinggi di Kalimantan Timur adalah sebesar 6.54% dan tingkat kemiskinan terendah sebesar 5.94%. PDRB tertinggi Kalimantan Timur adalah sebesar 6.22% dan PDRB terendah adalah sebesar (- 2.90%).

Tabel VIII. Statistik Deskriptif Provinsi Kalimantan Utara

	Kemiskinan	Pembiayaan	DPK	PDRB
Kalteng	an	an		B
Rata-rata	7.04	267.50	0	4.55
Minima			300.0	-
I	6.23	238.00	0	2.90
			416.0	
Max	9.57	297.00	0	8.18

Sumber: Data yang diolah

Tabel VIII menunjukkan kemiskinan tertinggi di Kalimantan Utara adalah sebesar 9.57% dan tingkat kemiskinan terendah sebesar 6.23%. PDRB tertinggi Kalimantan Timur adalah sebesar 8.18% dan PDRB terendah adalah sebesar (- 2.90%).

d) *Fixed Effect Model (FEM) Analisis*

Hasil estimasi *fixed effect models* adalah sebagai berikut:

Tabel IX. Estimasi Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Prob.
C	6.4429	0.0000
JUMLAH_PEMBIAYAAN	-0.0003	0.0000
DPK	0.0001	0.0007
PDRB	0.0568	0.0004
IKN	-0.0551	0.6503
R-squared	0.9733	
Adjusted R-squared	0.9669	
Prob(F-statistic)	0.0000	

Sumber: Data yang diolah

Pengaruh jumlah pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK), pendapatan domestik regional bruto (PDRB) signifikan mempengaruhi kemiskinan di Kalimantan karena nilai Prob < 0.05 Sedangkan variabel IKN tidak signifikan

berpengaruh terhadap kemiskinan di Kalimantan karena nilai Prob > 0.05.

Dari uji koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) R Squared: adalah besarnya pengaruh atau kemampuan variabel prediktor secara simultan dalam menjelaskan variabel response. Jika nilainya lebih dari 0,5 maka kemampuan variabel prediktor kuat dalam menjelaskan variabel response. Sedangkan sebaliknya jika nilainya kurang dari 0,5 maka kemampuan variabel prediktor tidak kuat dalam menjelaskan variabel response. Dalam regresi data panel ini, nilai R Square sebesar 0.9733, yang artinya variabel prediktor sangat kuat dalam menjelaskan variabel response.
- 2) Adjusted R Square: adalah besarnya pengaruh atau kemampuan variabel prediktor secara simultan dalam menjelaskan variabel response dengan memperhatikan standar error. penjelasannya sama dengan R Square namun nilai ini telah terkoreksi dengan standar error.
- 3) Nilai f hitung probabilitasnya sebesar 0,000. Pada tingkat signifikansi alfa 5% maka koefisien f statistik pada hasil uji tersebut signifikan karena $p = 0,000 < 0,05$.

Hasil estimasi *Fixed Effect Model (FEM)* persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut: $Kemiskinan = 6.4429 - 0.0003(Jumlah_Pembiayaan) + 0.0001(DPK) + 0.0568(PDRB) - 0.0551(IKN) + C$

Dari persamaan dapat dijelaskan bahwa setiap penambahan jumlah pembiayaan akan mengurangi kemiskinan sebesar (-0.0003). Setiap penambahan dana pihak ketiga (DPK) akan menambah kemiskinan sebesar 0.0001. Setiap penambahan PDRB akan menambah kemiskinan sebesar 0.0568. Pembangunan IKN mampu mengurangi kemiskinan sebesar (- 0.0551) namun tidak signifikan.

Pembahasan

Dari hasil analisis data panel menunjukkan bahwa pembiayaan syariah mampu mengatasi kemiskinan di provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Hal ini sesuai dengan Undang – undang. Menurut Undang-undang no 21 tahun 2008, Perbankan Syariah bertujuan

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bank syariah menyalurkan dana melalui pembiayaan yang akan digunakan oleh masyarakat untuk membuat usaha, meningkatkan usaha yang pada akhirnya akan menyerap tenaga kerja (Agung, dkk.2021). Pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah sesuai dengan kebijakan makroprudensial Bank Indonesia (BI) yaitu untuk mengatur sistem keuangan, khususnya kegiatan kredit. Tujuannya adalah untuk mencegah instabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kualitas fungsi intermediasi perbankan. (Agung, dkk. 2021).

Dari sisi penambahan dana pihak ketiga (DPK) ternyata dapat menambah kemiskinan di provinsi yang ada di Kalimantan. Menurut Keynes (1937) berpendapat bahwa menabung secara berlebihan dapat berbahaya bagi perekonomian. Teori tabungan dan kemiskinan John Maynard Keynes didasarkan pada gagasan bahwa individu harus menabung lebih sedikit dan membelanjakan lebih banyak untuk mencapai lapangan kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi. Keynes percaya bahwa pemerintah harus mengatasi masalah-masalah jangka pendek daripada menunggu kekuatan pasar untuk memperbaiki masalah dalam jangka panjang. Ia juga meyakini bahwa menabung dapat merugikan perekonomian.

Pada hasil penelitian ini Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menyebabkan kemiskinan. PDRB yang tidak disertai dengan penambahan kesempatan kerja dapat menyebabkan kemiskinan meningkat. PDRB yang tinggi menyebabkan kemiskinan meningkat yaitu adanya ketimpangan pembagian pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa penambahan kesempatan kerja dapat menyebabkan ketimpangan pembagian pendapatan. Hasil ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi tidak merata dan didominasi oleh kontribusi masyarakat golongan berpendapatan tinggi. Pertumbuhan

ekonomi yang tidak diikuti oleh pemerataan akan mengakibatkan ketimpangan ekonomi pada suatu daerah (Andykha, dkk.2018).

Penelitian ini juga memasukkan variabel ibu kota negara nusantara sebagai variabel yang mempengaruhi kemiskinan di Kalimantan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ibu kota negara nusantara berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Kalimantan. Tahun 2022, pemerintah Indonesia melalui Undang-undang no 3 tahun 2022 memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke kabupaten Penajam Paser Utara, provinsi Kalimantan Timur. Pindahan ini berpotensi akan meningkatkan PDB dan menurunkan kemiskinan yang ada di Pulau Kalimantan (Siswantoro, 2022). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2019) dalam kajiannya memprediksi PDB akan meningkat sebesar 0,1% sebagai akibat dari pemindahan IKN. Pindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan juga dapat menciptakan peluang pemerataan ekonomi, meningkatnya investasi, dan konektivitas antar wilayah (Taufiq, 2017), menciptakan kluster ekonomi baru di Indonesia (Nugroho, 2020) dan berdampak pada meningkatnya investasi baru di Kalimantan Timur, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perdagangan antar wilayah (Saraswati & Adi, 2022).

KESIMPULAN

Pengaruh pembiayaan syariah terhadap kemiskinan di provinsi yang ada di Kalimantan sangat signifikan. Hal ini menandakan bahwa fungsi intermediasi dari perbankan syariah sudah berfungsi dengan baik. Pembiayaan bank syariah menjadi alat yang sangat efektif dalam menurunkan kemiskinan karena menekankan pada keadilan, partisipasi dan keterlibatan antara bank dan nasabah untuk menjalankan usaha secara bersama-sama. Adanya pembangunan ibu kota negara nusantara yang berada di provinsi Kalimantan Timur membawa pengaruh terhadap penurunan kemiskinan di provinsi yang berada di Kalimantan. Hal ini berarti adanya arus modal dan investasi yang masuk sehingga membuka lapangan kerja membawa pengaruh terhadap

pendapatan bagi masyarakat yang ada di Kalimantan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S.A., Sudiarti, S., Syahputra, A. (2022). Principles of Rahn Contract Based on MUI Fatwa Number 25/DSN-MUI/III/2002 Concerning the Use of Pawn Land in the People of Southeast Aceh, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2022, 2836-2847.
- Alhudhori, M. (2017). Pengaruh Ipm, Pdrb Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 1(1), 113. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.12>
- Amijaya, R. N. F., Prasetyo, A.E., Pratama, R.Y., dan Kharisma, I.W. (2023). Does Islamic Finance Matter for Poverty Development in Indonesia?. *Airlangga Journal of Innovation Management*, 4(2), 185-197. <https://doi.org/10.20473/ajim.v4i2.49756>
- Andykha.R., Handayani, H.R., Woyanti, N. (2018). Analisis Pengaruh Pdrb, Tingkat Pengangguran, Dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 33 No. 2 hal 113-123
- Cholili, F. M. (2014). Analisa Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia). *Jurnal Ekonomi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(5), 557-577.
- Garavaglia, S.B., Dun, A.S., & Hill, B.M. (1998). *A Smart Guide To Dummy Variables : Four Applications And A Macro*.
- IMF., (2017), *Islamic Finance and the Role of the IMF*, diakses tanggal 10 Oktober 2024, dari <https://www.imf.org/external/themes/islamicfinance/index.htm>.
- Irwansyah, H. &. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 1-21.
- Lan, T.J., (2009), *Tinjauan Kritis Ketahanan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan dan Perdesaan, Ruang Sosial, Kebijakan dan Pola Kerentanan Sosial*. Jakarta: LIPI Press.
- Listiyani, F., (2023), Pengaruh Utang Luar Negeri Pemerintah Dan Sukuk Negara/Sbsn Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, *Disertasi Fakultas Ekonomi Trisakti, Jakarta*.
- Masrizal, M., & Trianto, B. (2022). THE ROLE OF PLS FINANCING ON ECONOMIC GROWTH: INDONESIAN CASE. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 49 - 64. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i1.1378>
- Nugroho, D. (2020). Bentuk dan Kekhususan Ibu Kota Negara Nusantara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP)*, 4(1), 53-62.
- Rana, J., Luna, G, P. & Oldroyd, J. (2021). Quantitative Methods. 10.1007/978-3-319-31816-5_460-1.
- Saraswati, M. K., & Adi, E. A. (2022). Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis SWOT. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2)
- Siswanto. (2022). Analisis Tingkat Kesiapan Anggaran dan Pembiayaan Indonesia dalam Memindahkan Ibu Kota Negara: Studi Kepustakaan. *JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 27-41. <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.27-41>
- Taufiq, M. (2017). Pemindahan ibu kota dan potensi konektivitas pemerataan ekonomi. *In Prosiding Seminar Nasional Pemindahan ibu kota Negara*, (pp. 99-115).
- Todaro, M.P., & Smith, S.C., (2003) *Pembangunan Ekonomi Di Dunia*, edisi kedelapan Jakarta : Penerbit Erlangga
- Tohirin. A. & Husaini. F., (2019), Does Islamic Banking Financing Help the Poor? *Proceeding of The 3rd International*

Conference on Accounting, Business & Economics (Ull-ICABE 2019).

Umam, K. (2016). *Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Setia.

Umar, U.H., Baita, A.J., Haron, M.H.B. dan Kabiru, S.H. (2021), The potential of Islamic social finance to alleviate poverty in the era of COVID-19: the moderating effect of ethical orientation, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 15 No. 2, pp. 255-270. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0371>.

Widarjono, A. (2016). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.